

**ANALISIS KEMAMPUAN FINANSIAL PETANI PIR
UNTUK MELAKSANAKAN PEREMAJAAN
KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA SIALANG SAKTI
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

TESIS

OLEH

**YUSRIAL
No. BP : 04202024**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



**ANALISIS KEMAMPUAN FINANSIAL PETANI PIR UNTUK
MELAKSANAKAN PEREMAJAAN KEBUN KELAPA SAWIT
DI DESA SIALANG SAKTI KECAMATAN DAYUN
KABUPATEN SIAK**

Oleh : Yusrial
No.BP.04202024

(Dibawah bimbingan Rudi Febriamansyah dan W.E Tinambunan)

Ringkasan

Untuk menjamin kesinambungan ekonomi petani PIR perkebunan kelapa sawit satu-satunya cara adalah dengan cara mengganti tanaman tersebut dengan tanaman yang baru, dalam arti kata tanaman tersebut perlu diremajakan. Untuk peremajaan kebun kelapa sawit masyarakat (PIR) tersebut memerlukan biaya yang cukup besar antara lain biaya untuk keperluan penumbangan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan sampai tanaman menghasilkan dan yang tidak kalah pentingnya adalah biaya hidup (*Living Cost*) keluarga petani selama tanaman belum menghasilkan.

Untuk itu telah dilakukan penelitian tentang analisis kemampuan finansial petani PIR untuk melaksanakan peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis keadaan sosial ekonomi petani PIR perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh PT. Perkebunan Nusantara V di desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun, dan untuk mengetahui keadaan perkebunan Perkebunan Kelapa sawit PIR di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun serta untuk mengetahui dan menganalisis keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dengan melaksanakan peremajaan oleh petani PIR di desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun. Penelitian ini menggunakan desain penelitian diskriptif kuantitatif dengan menggunakan metoda survey yaitu dengan melakukan penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional dalam bidang sub sektor perkebunan, selain ditujukan untuk peningkatan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, sekaligus juga harus mengupayakan pembangunan ekonomi rakyat yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, pemecahan kesenjangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas bangsa Indonesia pada umumnya dan petani perkebunan khususnya.

Secara langsung pembangunan sub sektor perkebunan telah berperan penting dalam pembangunan ekonomi Negara Indonesia. Hal ini telah terlaksana melalui perannya dengan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyediaan lapangan kerja dan bahan baku industri, peningkatan Devisa Negara, pendapatan petani dan pendapatan regional.

Berdasarkan bentuk pengusahaannya perkebunan dikategorikan atas 2 (dua) bentuk yaitu Perkebunan Besar (PB) dan perkebunan Rakyat (PR). Perkebunan Besar yang pengelolaannya dengan Badan Hukum dengan luas areal minimal 25 Ha, sementara perkebunan rakyat memiliki skala luas yang relatif kecil, terpencar-pencar serta memiliki produksi yang rendah, cara pengolahannya sangat sederhana dan pemasarannya lemah. Kondisi ini menimbulkan adanya kesenjangan ekonomi yang cenderung menimbulkan kecemburuan sosial antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar.

Menurut Soeripto (1996) Pembangunan perkebunan melalui PIR di Riau dimulai tahun 1978/1979 oleh PT. Perkebunan IV yaitu PIR/NES II Air Molek di

Kabupaten Indragiri Hulu dengan sumber dana pinjaman Bank Dunia dan berkembang secara pesat dari tahun ke tahun antara lain PIR NES ADB, PIR Khusus, PIR Lokal serta lebih meningkat lagi pengembangannya setelah keluarnya Inpres Nomor 1 tahun 1986 tentang pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan program Transmigrasi.

Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, yang selanjutnya disingkat dengan Pola PIR adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat sekitarnya sebagai plasma.

Melalui konsep PIR ini pengembangan perkebunan dipadukan sejak awal antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar dalam satu sistem kerja sama yang utuh, saling menguntungkan, berskala ekonomi dan berkelanjutan, sehingga dengan demikian kesenjangan antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar semakin dipersempit. Disamping itu pengembangan perkebunan dengan pola PIR dilakukan untuk membangun dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru dengan teknologi maju agar mampu memperoleh pendapatan yang layak serta meningkatkan kegiatan transmigrasi dengan mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang memadukan berbagai kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil.

Menurut Soeharto (1986) Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan pola PIR ini Perusahaan Inti mempunyai kewajiban antara lain yaitu: (1) membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan plasma (2) melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standar fisik yang

ditetapkan oleh Departemen Pertanian C.q Direktur Jenderal Perkebunan (3) bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta, dan petunjuk-petunjuk teknis dari Departemen Transmigrasi (4) membina secara teknis petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik (5) menampung (membeli) hasil kebun plasma dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian (6) membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta.

Sejak tahun 1982 di Kabupaten Siak (pada saat itu termasuk kedalam wilayah kabupaten Bengkalis) mulai melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit, yakni dengan masuknya Perusahaan Perkebunan Besar milik Negara dan Swasta. Pemerintah Daerah memberikan berbagai peluang dan kemudahan kepada perusahaan untuk membuka perkebunan kelapa sawit di beberapa tempat dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (pada saat itu), antara lain di Kecamatan Siak, dan Minas (saat ini sudah dimekarkan menjadi beberapa Kecamatan).

Seiring dengan lajunya perkembangan perkebunan kelapa sawit pola PIR di Propinsi Riau telah berjalan sejak tahun 1981, dengan luas kebun plasma yang telah dikembangkan mencapai 257.460 Ha dengan jumlah petani peserta adalah sebanyak 128,370 KK. Di beberapa lokasi pembangunan PIR tersebut telah menunjukkan keberhasilan hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan petani dan sebagian besar petani telah pula dapat melunasi kredit (Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2000).

Perkembangan pembangunan kebun kelapa sawit di Kabupaten Siak sampai tahun 2005 tercatat seluas 203.045,18 Ha yang tersebar pada beberapa

Kecamatan. Dari luas tersebut terdapat kebun kelapa sawit yang dibangun oleh PT. Perkebunan Nusantara V yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Dayun (dahulu sebelum pemekaran adalah Kecamatan Siak). Kebun kelapa sawit yang dibangun oleh PT. Perkebunan Nusantara V terdiri dari kebun inti seluas 7.296 Ha dan kebun plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat seluas 15.000 Ha dengan kepemilikan seluas 2 Ha/KK (Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak 2005).

Pembangunan Kebun plasma kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V pada tahun 1983/1984 yaitu di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun, dengan demikian apabila kita lihat dari segi usia produktif perkebunan sawit selama 25 tahun maka perkebunan sawit masyarakat (plasma) tersebut sudah harus dilakukan peremajaan pada tahun 2009.

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana dimaklumi bahwa tanaman kelapa sawit yang saat ini diusahakan dan menjadi andalan ekonomi oleh petani PIR mempunyai umur produktif selama 25 tahun, dimana suatu saat tanaman yang ada sekarang pasti akan menjadi tua, tidak dapat menghasilkan TBS lagi dan akhirnya mati serta tidak dapat lagi memberikan hasil kepada para petani pemilik.

Jika kita amati tanaman kelapa sawit masyarakat pada desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun yang ditanam pada tahun 1983/1984 berarti pada saat ini tanaman sudah berumur 23 tahun sehingga umur produktif tanaman hanya tinggal 2 tahun lagi, dengan demikian tanaman tersebut harus dilakukan peremajaan pada tahun 2009.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keadaan sosial ekonomi petani PIR di desa Sialang Sakti yang dapat dijelaskan yaitu: mayoritas petani PIR di Desa Sialang Sakti pada usia produktif, tingkat pendidikan digolongkan masih rendah mayoritas hanya berpendidikan pada tingkat sekolah dasar, jumlah tanggungan keluarga dikategorikan sedang, sumber pendapatan masih terfokus dan sangat tergantung pada kegiatan perkebunan sawit, memiliki pendapatan rumah tangga digolongkan tinggi, pengeluaran rumah tangga yang juga tinggi dan mayoritas memiliki aset kendaraan berupa sepeda motor.
2. Biaya yang diperlukan petani untuk melaksanakan peremajaan kebun kelapa sawit meliputi biaya tumbang tebas pohon sawit yang sudah tua, biaya penanaman dan perawatan tahun I, biaya perawatan tahun II dan biaya perawatan tahun ke III adalah sebesar Rp.32.053.181/Ha. Pada umumnya kebun yang akan dilakukan peremajaan luasnya adalah 2 Ha setiap kepala keluarga, jadi biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp.64.106.362,-
3. Kemampuan petani sawit di Desa Sialang Sakti untuk melakukan peremajaan kebun sawit tidak dapat hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari pendapatan dari hasil sawit dan tabungan IDAPERTABUN karena hal ini belum mencukupi untuk membiayai seluruh aktifitas peremajaan kebun hingga tahun ke III, namun jika ditinjau dari aset harta kekayaan yang mereka miliki sebenarnya petani sawit desa Sialang Sakti mampu melaksanakan

kegiatan peremajaan kebun kelapa sawit dengan cara memberikan aset yang mereka miliki sebagai jaminan kredit kepada lembaga keuangan/perbankan sebagai modal untuk melakukan kegiatan peremajaan.

4. Pemerintah Kabupaten Siak harus meninjau ulang rencana kebijakan untuk membantu petani melalui penyaluran kredit peremajaan kebun kelapa sawit dengan menggunakan dana APBD, karena kondisi petani saat ini sebenarnya mampu untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawit dengan cara peminjaman kredit pada lembaga keuangan/perbankan dengan jaminan aset yang mereka miliki.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan :

1. Kebijakan pemerintah dan pihak swasta serta seluruh *stakeholders* sangat diperlukan partisipasinya dalam memberikan solusi, agar petani mampu melakukan peremajaan, sehingga berbagai permasalahan pembangunan masyarakat pedesaan dapat diselesaikan.
2. Perencanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit sebaiknya dilakukan oleh petani pada usia kebun kelapa sawit masih produktif dan tidak menunggu usia produktif kebun kelapa sawit berakhir, kegiatannya dapat dilakukan dengan metode tanam sisip.
3. Pemerintah sebagai pengambil dan pembuat kebijakan perlu melakukan perencanaan kembali dan mengkaji ulang sistem Iuran Dana Peremajaan Kebun (IDAPERTABUN) untuk membantu petani PIR yang tidak utamu dalam melakukan peremajaan kebun secara swadaya dimasa mendatang.
4. Pemerintah Kabupaten melalui dinas perkebunan, Kepala Desa dan Koperasi yang ada di wilayah perkebunan kelapa sawit PIR perlu melakukan terobosan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Affandi., 1986. *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang tata cara penilaian fisik kebun.*
- Arikunto., 2002. *Prosedur Melakukan Penelitian.* Bina Aksara. Jakarta
- Badrun., 1996. *PIR Perkebunan, Kemitraan usaha besar dengan petani dalam agribisnis perkebunan,* Yayasan Agrimedia.
- Choliq., A. dkk, 1999. *Evaluasi Proyek.* Penerbit Pionir Jaya Bandung.
- Combs., P. H. dan Manzoor, A., 1992. *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-Formal.* Diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. Rajawali Press, Semarang. 501 hal.
- Dinas Perkebunan Propinsi Riau., 2000. *Program Idapertabun.*
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak., 2005. *Laporan Tahunan*
- _____, 2005. *Perkembangan Pelaksanaan penyiapan dana peremajaan tanaman perkebunan melalui program IDAPERTABUN di Wilayah PIR Kabupaten Siak.* Siak Sri Indrapura.
- Departemen Pertanian kerjasama Departemen luar negeri., 1990. *Prosiding penataran bupati KDH TK II/Ketua TP3D II Wilayah pengembangan PIR Perkebunan Tanggal 28 mei 2 juni 1990.* Jakarta. Tidak dipublikasikan.
- Effendy, O. U., 1989. *Human Relation and Public Relation.* Mandar maju Bandung, Bandung. 157 hal.
- Elfindri., 2002. *Ekonomi Patron-Client.* Andalas University Press.
- Gunawan Sumodiningrat., 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat* Pustaka Pelajar Jakarta.
- Hanafiah.,1987. *Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan.* Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Imam Amran., 1997. *PIR dan Manajemen Teknologi di Agribisnis Perkebunan,* Devisi Akademik II Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Isang Gonarsyah., 2000. *Kebutuhan Teknologi untuk Modernisasi Pertanian Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Terpadu,* Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.